



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
PULANG PISAU



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

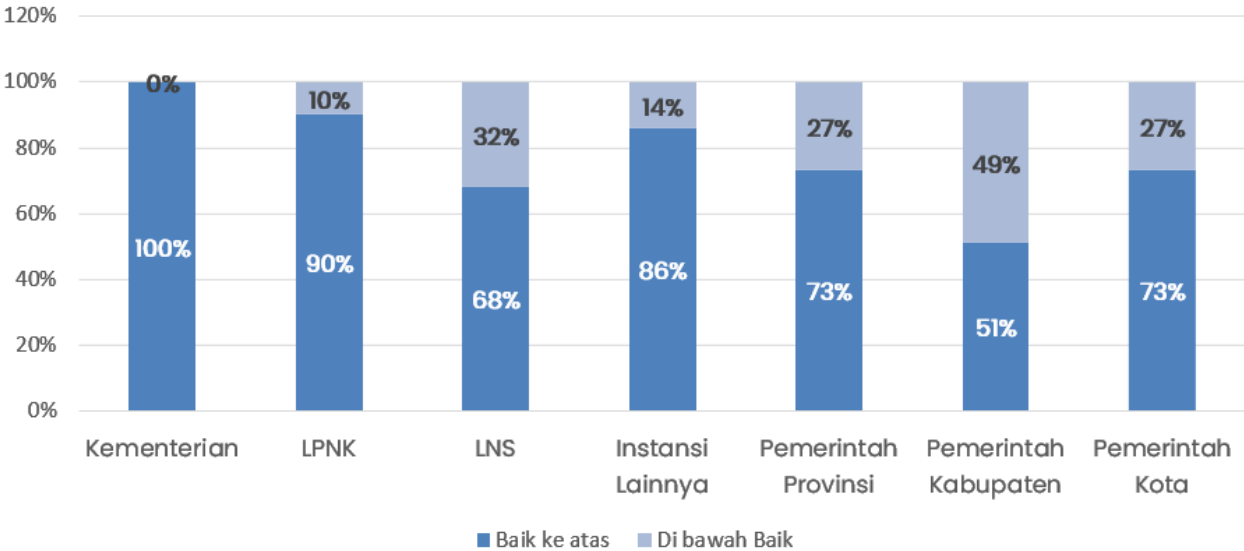
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 – Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 – Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 – Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 – Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 – Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 – Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 – Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

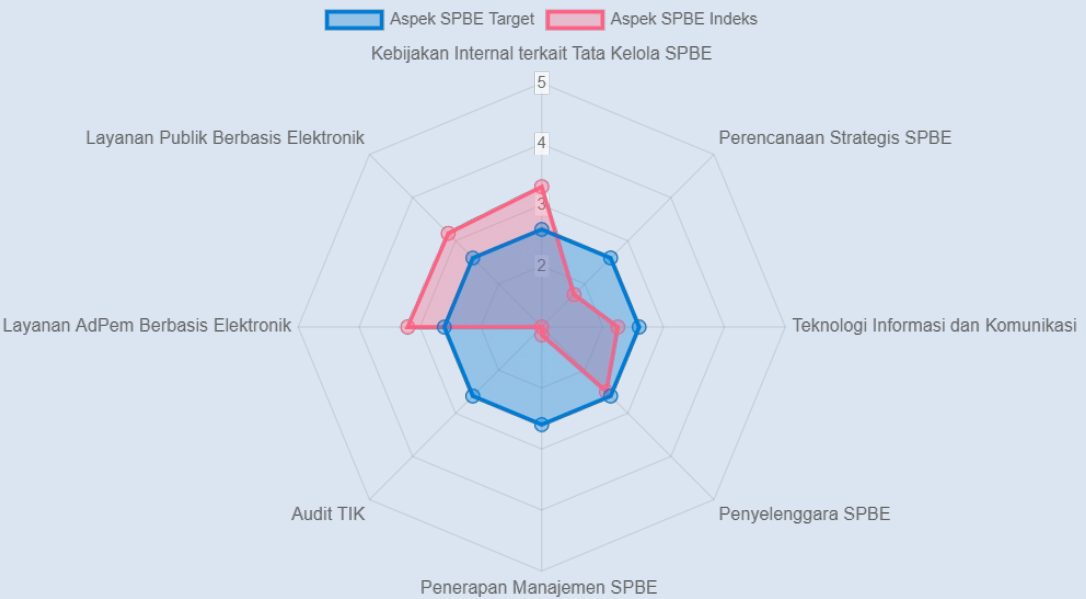
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,58
Domain Kebijakan SPBE	3,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,30
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,19
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE pada Pemda Pulang Pisau telah terpenuhi pada semua indikator yang meliputi: Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Kekuatan kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE hanya terdapat pada 4 indikator yakni Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.
- **Kelemahan**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Pemda Pulang Pisau masih lemah pada indikator Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Pemenuhan aspek Perencanaan Strategis pada pemda Pulang pisau meliputi indikator Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang unggul dari aspek Perencanaan Strategis pada Pemda Pulang Pisau
- **Kelemahan**
Kelemahan aspek ini terdapat pada indikator Inovasi Proses Bisnis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek TIK SPBE pada pemda Pulang Pisau telah memenuhi pada indikator Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang unggul pada aspek TIK yang dimiliki oleh Pemda Pulang Pisau
- **Kelemahan**
Kelemahan pemda Pulang Pisau pada aspek TIK terletak pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE.

D. Penyelenggara SPBE

Semua aspek Penyelenggara SPBE pemda Pulangpisau berupa indikator Tim Koordinasi SPBE IPPD dan Kolaborasi Penerapan SPBE telah memenuhi kriteria.

- **Kekuatan**
Belum ada kekuatan pada pemda pulang Pisau
- **Kelemahan**
Kelemahan penyelenggaraan SPBE di Kab Pulangpisau terdapat pada indikator Kolaborasi Penerapan SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Aspek Penerapan Manajemen yang telah memenuhi kriteria meliputi 7 indikator berupa Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- **Kekuatan**
Belum ada keunggulan atau kekuatan pada aspek penerapan manajemen SPBE di Pemda Pulangpisau
- **Kelemahan**
Kelemahan penerapan manajemen terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Penerapan Manajemen Perubahan.

F. Audit TIK

Belum terdapat indikator Audit TIK yang memenuhi kriteria pada pemda Pulangpisau

- **Kekuatan**
Belum ada keunggulan yang dimiliki oleh pemda Pulang Pisau pada aspek Audit TIK
- **Kelemahan**
Pemda Pulang pisau masih lenah dalam semua indikator Audit TIK yang meliputi: Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Semua indikator pada aspek layanan administrasi Pemerintah berbasis elektronik berupa: layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai telah memenuhi kriteria pemenuhan.

- Kekuatan
Kekuatan pemda Pulang Pisau terdapat pada indikator: Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- Kelemahan
Terdapat dua indikator yakni Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah dan Layanan Kinerja Pegawai yang masih lemah.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2, Layanan Publik Sektoral 3

- Kekuatan
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 3 (Pendidikan)
- Kelemahan
Tidak ada lagi indikator yang dianggap lemah pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi layanan SPBE baik Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai Aspek 3,60) maupun Layanan Publik Berbasis Elektronik (nilai Aspek 3,50) akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kab. Pulang Pisau. Domain Manajemen SPBE dengan nilai 1,55 masih memerlukan perhatian khusus. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kab. Pulang Pisau, sudah dapat menggambarkan predikat Baik (nilai Indeks SPBE 3,042) dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Penyelenggaraan layanan telah memiliki keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kab. Pulang Pisau dalam Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan sudah berada pada kategori Unggul (nilai aspek 3,60) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Nilai aspek 3,50). Penerapan SPBE telah menunjukkan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, SIMDA-K keuangan, LPSE, My-SAPK, SRIKANDI, SIMDA-BMD, e-Auditee, e-SAKIP, dan SAKIP sehingga layanan secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Keunggulan beberapa indikator merupakan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kab. Pulang Pisau dapat bergerak menuju efektif dan efisien, dan berkinerja optimal dimasa yang akan datang. Meskipun belum unggul, aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE sudah tergolong standar (nilai aspek 3,40). Penyempurnaan beberapa indikator pada aspek kebijakan berupa pelaksanaan revidu dan revisi peraturan dapat dilakukan untuk menuju level unggul. Hal ini juga dapat dilakukan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan aspek Penyelenggara SPBE.

Kelemahan

Namun disisi lain, Kab. Pulang Pisau masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE dalam hal Inovasi Proses Bisnis SPBE, aspek TIK dalam hal Pembangunan Aplikasi SPBE, Penerapan Manajemen SPBE yang kurang dalam hal Manajemen Perubahan dan Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Pada aspek Audit TIK, pemda Pulang Pisau masih harus bekerja menyusun rencana dan realisasi audit melalui penetapan Pedoman Audit TIK untuk Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE. Hal ini menyebabkan Layanan SPBE yang diberikan belum efektif dan optimal pemanfaatannya.

Apresiasi/Saran Perbaikan

Pada Aspek Kebijakan berupa Perbup Pulang Pisau No. 6 tahun 2021 tentang tata kelola penyelenggaraan SPBE yang mengatur secara internal perlu upaya revidu untuk memenuhi kebutuhan pedoman teknis SPBE Kab. Pulang Pisau. Aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan data berupa Masterplan TIK yang memuat SPBE perlu segera direvidu dan diperbaharui menjadi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sesuai Format Arsitektur SPBE Nasional (ABACUS) dan menyusun dokumen dan implentasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam hal Pembangunan Aplikasi perlu penataan sesuai Permenpanrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023. Aspek Penerapan Manajemen SPBE terdapat beberapa indikator yang harus direvidu secara berkelanjutan untuk peningkatan tatakelola khususnya pada Manajemen Perubahan dan Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Aspek Audit TIK merupakan aspek yang paling rendah tingkat kematangannya karena belum ada bukti dukung, perlu ditindaklanjuti dengan pengesahan Tim Audit Internal SPBE, Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Audit TIK. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya telah menjadi layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang dapat diandalkan di Kab. Pulangpisau. Namun perlu terus dipertahankan implementasinya bahkan dikembangkan agar pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian agar sesuai target atau bahkan melebihi target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Hasil Evaluasi SPBE 2023

Nama Form	: Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	: 2023
Deskripsi	: Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Pemerintah Kab. Pulang Pisau	
K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 2.58
Predikat SPBE	: Cukup

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	: 3.3
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.3
Domain Tata Kelola SPBE	: 2.1
Perencanaan Strategis SPBE	: 1.75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.25
Penyelenggara SPBE	: 2.5
Domain Manajemen SPBE	: 1.09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 3.19
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.2
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3.17

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3

47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5
----	--	---